



# PENINGKATAN KAPASITAS DESA DALAM PENANGANAN STUNTING

Policy Brief | Agustus 2021

# Ringkasan Eksekutif

Permasalahan stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Prevalensi stunting nasional pada tahun 2019 yaitu sekitar 27,7% yang mana itu termasuk tinggi. Oleh sebab itu, penurunan prevalensi stunting pada balita menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia yang diimplementasikan di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Maka, diperlukan usaha bersama untuk percepatan pencegahan stunting salah satunya melalui pemerintah desa dengan peningkatan kapasitas desa dalam penanganan stunting.

## Pendahuluan

Berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara dari 17 negara yang memiliki tiga permasalahan sekaligus, yaitu *stunting* (pendek), *wasting* (kurus), dan *overweight* (obesitas). Stunting atau kerdil sendiri adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang apabila dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk ke dalam masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh bayi.

Secara nasional, permasalahan stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah stunting belum dapat sepenuhnya diatasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadikan program penurunan angka stunting menjadi salah satu program pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menetapkan program percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cara penurunan persentase balita stunting di Indonesia.

Prevalensi stunting nasional berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yaitu sekitar 27,7%. Sedangkan target prevalensi stunting tahun 2020 adalah 24,1% atau sekitar 5.543.000 balita. Namun, pandemi menyebabkan terjadinya gangguan layanan gizi terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu karena pembatasan mobilitasi dan kegiatan masyarakat.

# Analisis

Desa Candirejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di mana Kabupaten Klaten menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sasaran sosialisasi stunting. Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa daerah di Kabupaten Klaten yang menjadi daerah lokus penanganan stunting, termasuk Desa Candirejo. Meskipun secara geografis yang bagus, belum sepenuhnya menjamin tidak adanya stunting di daerah-daerah. Di Desa Candirejo sendiri setidaknya terdapat anak stunting dengan ciri tinggi dan berat badan kurang yang disebabkan karena kekurangan gizi maupun faktor keturunan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama atas peningkatan kapasitas desa dalam penanganan stunting di Desa Candirejo.

Berdasarkan kajian dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting setidaknya terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanganan stunting seperti program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi atau penyakit. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen nasional dalam rangka penurunan angka stunting yang kemudian diimplementasikan dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa termasuk melibatkan peran serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Selain program intervensi dari pemerintah pusat, terdapat juga program penanganan stunting dengan pelibatan masyarakat secara langsung, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan dengan mensinergikan tindakan promotif dan preventif dari permasalahan stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dikampanyekan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan tim penggerak pemberdayaan keluarga. Selain itu, terdapat juga Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang berupa komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di bawah koordinasi dari Dinas Kesehatan.

Program aksi penanganan stunting yang terintegrasi telah berhasil direncanakan secara nasional. Namun, hal tersebut perlu didorong agar menjadi program nyata yang sampai ke masyarakat dan berhasil mencapai tujuannya yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Oleh karena itu, perlu sinergitas implementasi program dari pusat sampai ke tataran masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, program intervensi penanganan stunting yang terintegrasi dapat diimplementasikan hingga ke tingkat operasional di pemerintahan desa atau kelurahan. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas desa dalam upaya penanganan stunting.

# Kesimpulan

Program penanganan stunting membutuhkan keterlibatan pemerintah baik dari pusat maupun daerah serta melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Perlu adanya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah termasuk pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat perlu memperkuat koordinasi antar sektor baik dari tingkat daerah kabupaten, kecamatan, maupun desa untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kapasitas desa yang mumpuni dalam mencapai tujuan penanganan stunting.

# Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian mengenai perlunya peningkatan kapasitas desa dalam upaya penanganan stunting untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, maka dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

**Pertama**, perlu mengubah pola pikir masyarakat terkait stunting. Masyarakat umum merupakan target kebijakan penurunan stunting, maka dari itu diperlukan pemahaman bersama bahwa stunting merupakan masalah kesehatan serius yang harus cepat ditangani karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di era selanjutnya. Merubah pola pikir atau *mindset* di masyarakat mengenai stunting dapat dimulai dengan adanya sosialisasi mengenai stunting agar muncul kesadaran untuk mencegah stunting sejak dini.

**Kedua**, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari para pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan diperlukan untuk merencanakan program penanggulangan stunting yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan dari lembaga akademik (perguruan tinggi). Selain itu, kerja sama dengan lembaga akademik perlu dilakukan untuk menganalisis permasalahan stunting, baik dari penyebab serta tingkat stunting yang ada, agar mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran.

**Ketiga**, perlu adanya program intervensi penanganan stunting dalam skala desa yang menjadi program prioritas desa. Dapat dilakukan mulai dari pembentukan kader stunting yang berfokus dalam menangani masalah stunting di desa dengan dukungan dari pemerintah desa dan operasional desa. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan program intervensi skala desa, perlu adanya monitoring dari tingkat pemerintah di atasnya, seperti Bappeda di tingkat kabupaten yang perlu mengawal setiap program intervensi stunting yang dilakukan desa agar tercipta sinkronisasi program dari pusat ke daerah sesuai dengan tujuan penanganan stunting. Program intervensi stunting skala desa dapat dituangkan dalam bentuk peraturan desa agar menjadi pedoman dasar regulasi yang sah.

# Daftar Pustaka

asset.kompas.com

Candra, Aryu. (2020). Epidemiologi Stunting. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Kartasurya, Martha Irene, Suyatno. Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

Kementerian Kesehatan. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Saktenane.com. (2020) Klaten Menjadi Sasaran Sosialisasi Pencegahan Stunting. Retrieved from <https://saktenane.com/2020/10/24/klaten-menjadi-sasaran-sosialisasi-pencegahan-stunting/>. Accessed: 2021-08-04.

stunting.go.id